

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Penduduk suatu kota memegang peran yang sangat penting dalam setiap studi perkotaan. Hal ini disebabkan karena perkembangan penduduk kota baik yang menyangkut kuantitas maupun kualitas merupakan faktor utama dari eksistensi kota itu sendiri. Seiring berkembangnya beragam aktivitas perkotaan, memicu pertumbuhan penduduk sebagai sarana pelaksanaannya. Pertumbuhan penduduk dalam suatu wilayah perkotaan selalu diikuti oleh peningkatan kebutuhan ruang. Semakin tinggi jumlah penduduk maka semakin tinggi pula kebutuhan akan ruang kota, oleh karena itu faktor penduduk menjadi salah satu kontribusi terbesar bagi terbentuknya aktivitas perkotaan. Terdapat berbagai aktivitas yang menjadi ciri perkotaan, antara lain pemukiman, industri, komersial, dan lain-lain.

Disisi lain, masalah transportasi juga sangat berkaitan erat dengan kebijakan tata ruang. Pakar ilmu transportasi Warpani (1987) berpendapat bahwa ruang merupakan kegiatan yang ditempatkan diatas lahan kota, sedangkan transportasi merupakan sistem jaringan yang secara fisik menghubungkan satu ruang kegiatan dan ruang kegiatan lainnya. Perencanaan kota tanpa mempertimbangkan keadaan dan pola transportasi akibat dari perencanaan itu sendiri akan menimbulkan keruwetan lalu lintas di kemudian hari yang berakibat dengan meningkatnya kemacetan lalu lintas dan akhirnya meningkatkan pencemaran udara.

Peraturan Daerah Kota Cirebon Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas menimbang bahwa sesuai dengan Pasal 95 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, Pemerintah Daerah Kota Cirebon diberi Kewenangan untuk mengatur Penetapan Kebijakan Pengguna Jaringan Jalan dan Gerakan Lalu Lintas.

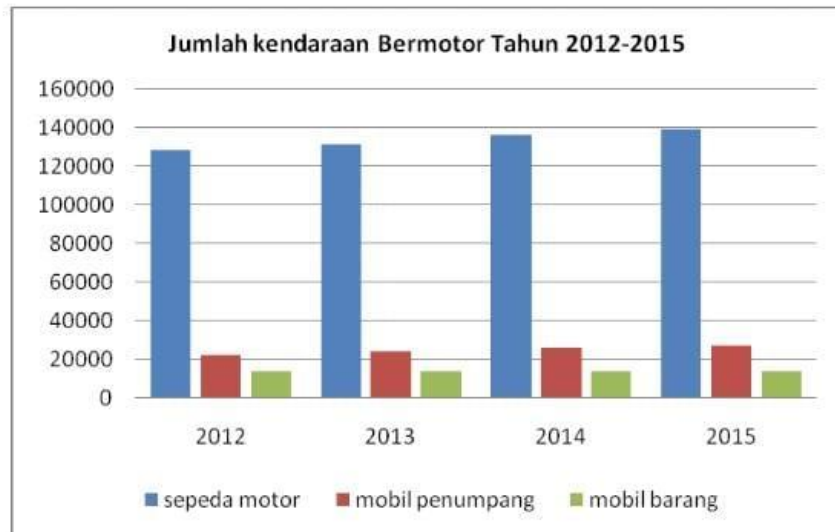
Peraturan Daerah Kota Cirebon Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Penyelenggaraan Analisis Dampak Lalu Lintas menimbang bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 47 Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2011 Tentang Manajemen Kebutuhan Lalu Lintas perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Analisis dan Dampak Lalu Lintas. Wali Kota Cirebon memutuskan dan menetapkan Peraturan Daerah Tentang Penyelenggaraan Analisis Dampak Lalu Lintas dalam BAB 1 Ketentuan Umum dalam Pasal 1 dalam Peraturan ini daerah ini yang dimaksud dengan, Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas adalah kegiatan yang dilakukan untuk mengoptimalkan penggunaan seluruh jaringan jalan, guna peningkatan keselamatan, ketertiban dan kelancaran lalu lintas.

Dinas Perhubungan (DISHUB) merupakan unsur pelaksanaan Pemerintah Daerah di bidang Perhubungan yang di pimpin oleh Kepala Dinas dan berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekertaris Daerah. Berdasarkan UU 22 Tahun 2009 maka Tugas dan Fungsi Dinas Perhubungan adalah sebagai berikut: penetapan rencana umum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas, Persyaratan teknis dan layak jalan kendaraan bermotor, perizinan angkutan umum, pengembangan sistem informasi dan komunikasi di bidang sarana dan prasarana lalu lintas dan angkutan jalan, pembinaan

sumber daya manusia penyelenggara sarana dan prasarana lalu lintas dan angkutan jalan, dan penyidik terhadap perizinan angkutan umum, persyaratan teknis dan kelayakan jalan kendaraan bermotor yang memerlukan keahlian dan peralatan khusus yang dilaksanakan sesuai dengan ketentuan Undang-Undang.

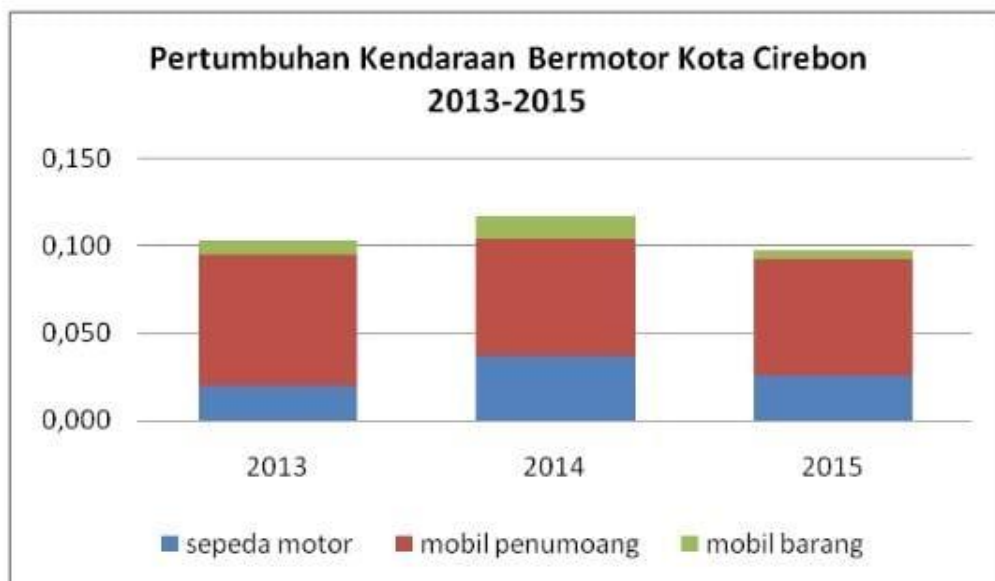
Kedudukan dinas perhubungan di Kota Cirebon merupakan lembaga teknis daerah sebagai unsur penunjang pemerintah daerah. Dinas perhubungan kota Cirebon berperan sebagai penunjang dalam menciptakan penyelenggaraan perhubungan yang menjamin keselamatan, keamanan, kelancaran, ketertiban dan kenyamanan serta kelestarian lingkungan hidup. Demi tercapainya akuntabilitas instansi pemerintah yang baik dalam mengurangi angka kemacetan, Dinas Perhubungan dituntut untuk melakukan pembenahan. Pembenahan itu sendiri diharapkan mampu meningkatkan peran dan fungsi Dinas perhubungan sebagai sub sistem dari sistem Pemerintah Daerah yang berupaya memenuhi aspirasi masyarakat.

Kota Cirebon dengan luas kota yang hanya 38 km persegi, lalu lintas kendaraan di Kota Cirebon saat ini sebenarnya sudah tergolong padat. Peningkatan jumlah penduduk akan meningkatkan tingkat mobilitas penduduk yang akhirnya akan mendorong tingkat permintaan jumlah transportasi. Berikut adalah jumlah kendaraan bermotor dan jumlah pertumbuhan kendaraan bermotor Kota Cirebon:



Gambar 1.1
Jumlah Kendaraan Bermotor Tahun 2012-2015

Sumber: Dinas Perhubungan Kota Cirebon Tahun 2022



Gambar 1.2
Pertumbuhan Kendaraan Bermotor kota Cirebon 2013-2015

Sumber: Dinas Perhubungan Kota Cirebon Tahun 2022

Kemacetan di Kota Cirebon terjadi di beberapa titik seperti pusat perbelanjaan, pertokoan, sekolah dan sedikitnya ada 11 perlintasan kereta api di Kota Cirebon, bisa dibayangkan betapa padatnya lalu lintas kendaraan di Kota Cirebon saat ini. Kemacetan itu sendiri dapat dipahami sebagai akibat dari adanya kegiatan masyarakat atau aktivitas ekonomi yang terjadi. Selain itu, banyak faktor yang menyebabkan terjadinya kemacetan di Kota Cirebon diantaranya masih banyak kendaraan yang berhenti sembarangan, banyak pengendara yang parkir sembarangan, angkutan umum ngetem atau berhenti sembarangan, volume kendaraan yang melebihi kapasitas jalan, adanya perlintasan kereta api dan masih banyak PKL yang berjualan dipinggir jalan. Salah satu jalan yang sering mengalami kemacetan adalah di jalan Pekiringan kota Cirebon.

Dari fenomena tersebut mengidentifikasi bahwa penerapan kebijakan penanganan kemacetan di Kota Cirebon belum berjalan dengan maksimal dikarenakan masih banyak titik-titik kemacetan yang belum teratasi terutama di jalan Pekiringan Kota Cirebon.

Maka dari itu peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul **“Implementasi Kebijakan Penanganan Kemacetan di Kota Cirebon (Studi Kasus di Jalan Pekiringan)”**

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan permasalahan diatas dapat dirumuskan yaitu belum optimalnya Penanganan Kemacetan di Kota Cirebon (Studi Kasus di jalan Pekiringan).

1.3 Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang dan rumusan masalah yang telah diuraikan, maka penulis membuat identifikasi masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana Implementasi Kebijakan Penanganan Kemacetan di Kota Cirebon?
2. Faktor-faktor apa saja hambatan-hambatan dalam Implementasi Kebijakan Penanganan Kemacetan di Kota Cirebon?
3. Bagaimana upaya yang dilakukan Dinas Perhubungan Kota Cirebon dalam Menangani Kemacetan di Kota Cirebon?

1.4 Tujuan Penelitian

Berdasarkan identifikasi masalah diatas, maka tujuan dari penelitian ini yaitu sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui bagaimana Implementasi Kebijakan Penanganan Kemacetan di Kota Cirebon.
2. Untuk mengetahui apa saja hambatan-hambatan dalam Implementasi Kebijakan Penanganan Kemacetan di Kota Cirebon.
3. Untuk mengetahui upaya yang dilakukan Dinas Perhubungan Kota Cirebon dalam Menangani Kemacetan di Kota Cirebon.

1.5 Kegunaan Penelitian

Dari hasil penelitian ini, maka kegunaan penelitian yang penulis harapkan adalah sebagai berikut:

a. Secara Teoritis

1. Dengan penelitian ini diharapkan penulis dapat menambah pengetahuan tentang Implementasi Kebijakan Penanganan Kemacetan di Kota Cirebon.

Dan diharapkan penelitian ini dapat memberi solusi dalam mengatasi masalah kemacetan di Kota Cirebon khususnya di jalan Pekiringan.

2. Hasil dari penelitian yang penulis lakukan diharapkan dapat menjadikan bahan acuan dalam penelitian selanjutnya dengan masalah yang sama.

b. Secara Praktis

1. Bagi penulis, dapat menambah wawasan mengenai hal yang berkaitan dengan implementasi kebijakan Publik.
2. Bagi instansi, diharapkan dapat memberikan masukan/solusi dalam menangani kemacetan di Kota Cirebon Khususnya di jalan Pekiringan.
3. Bagi umum, diharapkan dapat memberikan pengetahuan baru tentang implementasi kebijakan tentang penanganan kemacetan.

1.6 Kerangka Pemikiran

Implementasi kebijakan dipandang dalam pengertian luas, merupakan alat administrasi hukum dimana berbagai aktor, organisasi, prosedur dan teknik yang bekerja bersama-sama untuk menjalankan kebijakan guna meraih dampak atau tujuan yang diinginkan.

Meter dan Horn (1979) implementasi kebijakan:

“Policy implementation encompasses those action by public and provate individuals (ans groups) that are directed at the achievement of goals and objectives set dorth in prior policy decisions”. Definisi tersebut memberi makna bahwa implementasi kebijakan adalah tindakan-tindakan yang dilaksanakan oleh individu-individu (dan kelompok-kelompok) pemerintah dan swasta yang diarahkan pada pencapaian tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan.

Mazmanian dan Sabatier dalam Agustino (2016: 196):

“implementasi kebijakan adalah pelaksanaan keputusan kebijakan dasar, biasanya dalam bentuk Undang-Undang, namun dapat pula berbentuk perintah-perintah atau keputusan-keputusan eksekutif yang penting atau keputusan badan peradilan. Lazimnya, keputusan tersebut mengidentifikasi masalah-masalah yang ingin diatasi, menyebutkan secara tegas tujuan dan sasaran yang ingin dicapai, dan berbagai cara untuk menstrukturkan atau mengatur proses implementasinya”.

Beberapa pendekatan yang dapat dilakukan dalam mengimplementasikan suatu kebijakan, yaitu:

- a. Pendekatan Struktural
- b. Pendekatan Prosedural dan Manajerial
- c. Pendekatan Keprilakuan
- d. Pendekatan Politik

Menurut Anderson (Tahir, 2014:56-57), menyatakan bahwa dalam mengimplementasi suatu kebijakan ada empat aspek yang harus diperhatikan, yaitu:

1. Siapa yang dilibatkan dalam implementasi
 2. Hakikat proses administrasi
 3. Kepatuhan atas suatu kebijakan
 4. Efek atau dampak dari implementasi
- Untuk dapat menilai bagaimana implementasi dari kebijakan penanganan

kemacetan. Oleh karena itu, perlu adanya kriteria dimensi/variabel yang menunjukan suatu implementasi dikatakan baik atau tidak. George C. Edward III (dalam buku Winarno, 2014: 177) berpandangan bahwa implementasi kebijakan dipengaruhi oleh empat variabel, yaitu:

1. Komunikasi
2. Disposisi
3. Sumber Daya
4. Struktur Birokrasi

Penjelasannya sebagai berikut:

1. Komunikasi

Variabel pertama yang mempengaruhi keberhasilan suatu kebijakan adalah komunikasi, implementasi yang efektif terjadi apabila para pembuat keputusan sudah mengatur apa yang akan mereka kerjakan. Pengetahuan atas apa yang akan mereka kerjakan dapat berjalan bila komunikasi berjalan dengan baik, sehingga setiap keputusan kebijakan dan peraturan implementasi harus di transmisikan (atau di komunikasikan) kepada bagian personalia yang tepat. Selain itu, kebijakan yang di komunikasikan pun harus tepat, akurat, dan konsistensi. Terdapat tiga indikator yang dipakai atau digunakan dalam mengukur keberhasilan variabel komunikasi tersebut yaitu: transmisi, kejelasan dan konsistensi.

2. Sumberdaya

Variabel atau faktor kedua yang mempengaruhi keberhasilan implementasi atau kebijakan adalah sumber daya. Sumberdaya merupakan hal yang penting, menurut George C. Edward III, dalam mengimplementasikan kebijakan, indikator sumberdaya terdiri dari beberapa elemen, yakni sebagai berikut: staf, informasi, wewenang dan fasilitas.

3. Disposisi

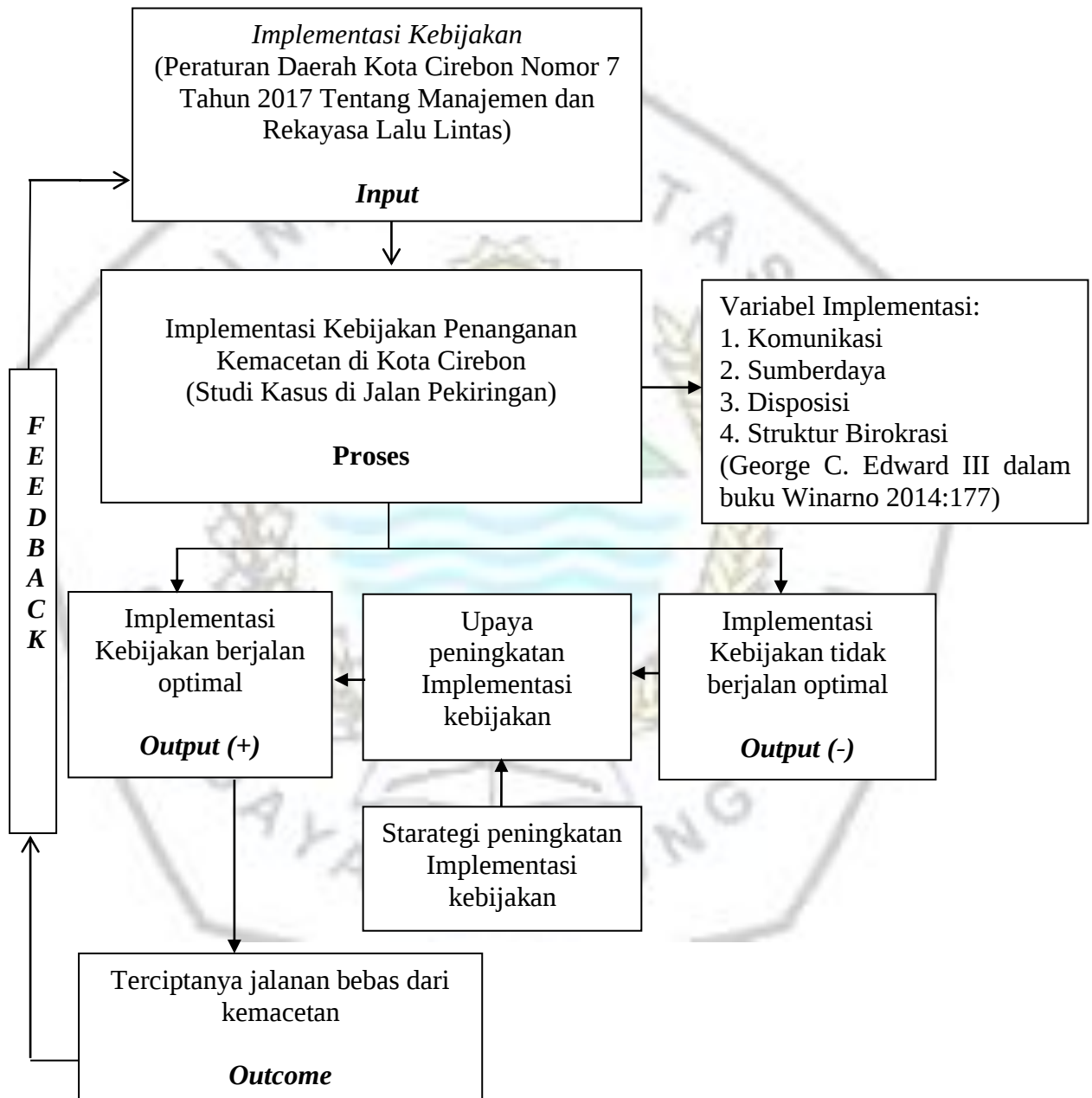
Disposisi atau sikap dari pelaksana kebijakan adalah faktor penting ketiga dalam pendekatan mengenai pelaksanaan suatu kebijakan publik. Jika pelaksanaan suatu kebijakan ingin efektif, maka para pelaksana kebijakan tidak hanya harus mengetahui apa yang akan dilakukan tetapi harus memiliki kemampuan untuk melaksanakannya, sehingga dalam praktiknya tidak terjadi bias. Hal-hal yang perlu dicermati pada variabel disposisi, yakni sebagai berikut: pengangkatan birokrasi dan insentif.

4. Struktur Birokrasi

Walaupun sumber-sumber untuk melaksanakan suatu kebijakan tersedia, atau para pelaksana kebijakan mengetahui apa yang seharusnya dilakukan dan mempunyai keinginan untuk melaksanakan suatu kebijakan kemungkinan kebijakan tersebut tidak dapat terlaksana atau terrealisasi karena terdapat kelemahan dalam struktur birokrasi.

Dua karakteristik menurut Edward III, yang dapat mendorong kinerja struktur birokrasi atau organisasi ke arah yang lebih baik, yakni melakukan *Standard Operating Procedure* (SOP) dan melaksanakan Fragmentasi. SOP adalah suatu kegiatan rutin yang memungkinkan para pegawai atau pelaksana kebijakan melaksanakan kegiatan-kegiatan pada tiap harinya sesuai dengan standar yang ditetapkan sedangkan pelaksana fragmentasi adalah upaya penyebaran tanggung jawab kegiatan-kegiatan atau aktivitas-aktivitas pegawai diantara unit kerja.

Berdasarkan uraian diatas maka dapat dilihat kerangka dasar pemikiran yang digunakan sebagai dasar atau landasan dalam pengembangan berbagai konsep dan teori yang digunakan dalam penelitian ini, hal ini dapat dilihat dari kerangka pemikiran sebagai berikut:



Gambar 1.3

Kerangka Pemikiran

1.7 Definisi dan Operasional Konsep Penelitian

1.7.1 Definisi Konsep Penelitian

Untuk menyamakan persepsi dan pemahaman dalam penelitian maka dikemukakan definisi operasional sebagai berikut:

a. Implementasi kebijakan

George C. Edward (dalam Winarno 2014:177) implementasi kebijakan adalah:

“salah satu tahap kebijakan publik, antara pembentukan kebijakan dan konsekuensi-konsekuensi kebijakan bagi masyarakat yang dipengaruhi. Jika suatu kebijakan tidak tepat atau tidak dapat mengurangi masalah yang merupakan sasaran dari kebijakan, maka kebijakan itu mungkin akan mengalami kegagalan sekalipun kebijakan itu diimplementasikan dengan sangat baik”.

Menurut Wahab (Tahir, 2014:55):

“bahwa implementasi kebijakan adalah: pelaksanaan keputusan kebijakan dasar, biasanya dalam bentuk undang-undang, namun dapat pula berbentuk perintah-perintah atau keputusan-keputusan eksekutif yang penting atau keputusan badan peradilan lazimnya, keputusan tersebut mengidentifikasi masalah yang diatasi, menyebutkan secara tegas tujuan/sasaran yang ingin dicapai, dan berbagai cara untuk menstruktur/mengatur proses implementasinya”.

Sedangkan menurut Meter dan Carl (Nastia, 2014:201):

Implementasi kebijakan menekankan pada tindakan, baik yang dilakukan oleh pihak pemerintah maupun individu (atau kelompok) swasta yang diarahkan untuk mencapai tujuan-tujuan yang telah ditetapkan dalam suatu keputusan kebijakan sebelumnya. Pada suatu saat tindakan-tindakan ini, berusaha mentransformasikan keputusan-keputusan menjadi pola-pola operasional serta melanjutkan usaha-usaha tersebut untuk mencapai perubahan, baik yang besar maupun yang kecil yang diamanatkan oleh keputusan-keputusan kebijakan tertentu”.

Maka dari pengertian diatas dapat disimpulkan bahwa: implementasi kebijakan merupakan pelaksanaan yang mengacu pada pedoman-pedoman yang dibuat sehingga pelaksanaannya dapat memberikan kontribusi dalam menganggulangi permasalahan yang menjadi sasaran program suatu kebijakan.

b. Penanganan

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) penanganan memiliki arti yang menyatakan sebuah tindakan yang dilakukan dalam melakukan sesuatu. Penanganan juga dapat berarti proses, cara, perbuatan menangani sesuatu yang sedang dialami.

c. Kemacetan

Kemacetan adalah situasi atau keadaan tersendatnya atau berhentinya lalu lintas yang disebabkan oleh banyaknya jumlah kendaraan yang melebihi kapasitas jalan. Kemacetan semakin meningkat apabila arus begitu besarnya sehingga kendaraan sangat berdekatan satu sama lain. Kemacetan total terjadi apabila kendaraan harus berhenti atau bergerak sangat lambat (Tamin, 2000).

1.7.2 Operasional Konsep Penelitian

Operasional konsep penelitian yang menghubungkan variabel dengan adanya dimensi-dimensi dari konsep teori dapat dilihat dari tabel berikut:

Tabel 1.1
Operasional Konsep Penelitian

Konsep	Dimensi	Parameter
Implementasi Kebijakan George Edward III (Winarno, 2014:177)	1. Komunikasi	1. Transmisi 2. Kejelasan 3. Konsistensi
	2. Sumberdaya	1. Staf 2. Informasi 3. Wewenang 4. Fasilitas
	3. Disposisi	1. Pengangkatan Birokrasi 2. Insentif
	4. Struktur	1. SOP 2. Fragmentasi

1.8 Metode Penelitian

1.8.1 Metode Penelitian yang digunakan

Metode penelitian terhadap permasalahan yang sedang terjadi dengan pendekatan kualitatif menurut Sugiono (2016:24)

“Metode penelitian yang berlandaskan pada filsafat postpositivisme, digunakan untuk meneliti kondisi obyek yang alamiah, dimana peneliti adalah instrumen kunci, teknik pengumpulan data dilakukan secara triangulasi (gabungan observasi, wawancara dan dokumentasi), data yang diperoleh cenderung kualitatif, analisis data bersifat induktif atau kualitatif, dan hasil penelitian bersifat untuk menekankan makna dari pada generalisasi”.

Metode kualitatif digunakan untuk mendapatkan data yang mendalam, suatu data yang mengandung makna adalah data yang sebenarnya data yang pasti merupakan suatu nilai dibalik data yang tampak. Oleh karena itu, dalam penelitian kualitatif tidak menekan pada generalisasi, tetapi lebih menekan pada makna.

Metode Penelitian Kualitatif menurut Moleong (2016:6) adalah:

“Penelitian yang bermaksud untuk memahami fenomena tentang apa yang dialami oleh subjek penelitian misalnya perihal persepsi, motivasi, tindakan, dan lain-lain secara holistik, dan dengan cara deskripsi dalam bentuk kata-kata bahasa, pada suatu konteks khusus yang alamiah dan dengan memanfaatkan berbagai metode alamiah”.

Metode yang penulis gunakan untuk penelitian adalah metode kualitatif yang bersifat deskriptif dan metode penelitian kualitatif itu dilakukan secara interatif. Alasan penulis menggunakan metode penelitian kualitatif bahwa penelitian yang di gunakan untuk mengetahui implementasi kebijakan dalam menangani kemacetan yang sudah berjalan atau belum optimal. Dan mencari faktor-faktor penghambat implementasi kebijakan dalam menangani kemacetan bukan untuk mencari berapa besar pengaruh dari suatu variabel terhadap variabel lain, tetapi penelitian yang penulis lakukan adalah menggali, menemukan dan menjelaskan tentang Implementasi Kebijakan Penanganan Kemacetan di Kota Cirebon terutama di jalan Pekiringan dalam mengatasi permasalahan kemacetan di Kota Cirebon yang belum optimal.

1.8.2 Informan dan Teknik Pemilihan Informan

Pada penelitian kualitatif pemilihan informan tidak selalu menjadi wakil dari seluruh objek penelitian, tetapi yang paling terpenting informan memiliki pengetahuan yang cukup serta mampu menjelaskan keadaan yang sebenarnya tentang objek penelitian. Teknik pemilihan informan menggunakan teknik purposive (purposive sampling) dalam teknik ini peneliti memilih sampel sesuai kebutuhan. Menentukan informan kunci yaitu orang yang paling banyak mengetahui tentang masalah yang diteliti, dan informan pendukung yaitu orang-orang diluar informan kunci yang dapat memberikan informasi pelengkap atau tambahan yang diperlukan peneliti dalam penelitian ini mengenai implementasi kebijakan. Informan-informan dalam penelitian ini yaitu:

Informan dalam penelitian ini di bagi menjadi dua jenis informan, yaitu:

1. Informan Kunci adalah Kepala Bidang Keselamatan dan Teknik Sarana
2. Informan Pendukung adalah Masyarakat yang Melintas/Pengguna Kendaraan di Jalan Pekiringan

1.8.3 Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Studi Kepustakaan, yaitu teknik pengumpulan data dari sumber-sumber tertulis yaitu buku-buku arsip, monografi, surat kabar, internet dan sumber-sumber tertulis lainnya.

2. Studi lapangan, Studi lapangan ini dilakukan dengan cara menggunakan beberapa teknik, diantaranya:
- a. Observasi atau pengamatan, yaitu teknik pengumpulan data melalui pengamatan secara langsung terhadap objek penelitian untuk mengamati secara kualitatif berbagai kegiatan dan peristiwa yang terjadi. Teknik ini biasanya diartikan sebagai pengamatan dari sistem fenomena yang diselidiki dimana observasi dalam penelitian dilakukan dengan observasi langsung yaitu suatu cara pengumpulan data yang dilakukan melalui pengamatan dan pencatatan gejala-gejala yang tampak pada objek penelitian, pelaksanaannya langsung dimana suatu peristiwa terjadi, adapun sistem yang dipilih dan disepakati padaa observasi langsung adalah dimana kedudukan penelitian hanya sebagai pengamat bukan anggota sepenuhnya dari objek yang sedang diteliti.
 - b. Wawancara yaitu teknik Pengumpulan data dengan cara mengadakan tanya jawab dengan para informan wawancara yang dilakukan dalam penelitian kualitatif adalah wawancara terpimpin/terstruktur yang dilakukan dengan cara mendalam (*deph interview*). Kedalaman wawancara ini sangat penting dalam penelitian kualitatif karena akan memperoleh data atau informasi yang benar-benar lengkap, sehingga peneliti melakukan analisis dengan tajam dan mendalam.

- c. Dokumentasi penelusuran dokumentasi untuk mendapatkan informasi yang mendukung analisis dan interpretasi data. Data ini berupa data, foto, video dan rekaman.

1.8.4 Teknik Pengujian Keabsahan

Teknik keabsahan data dalam penelitian kualitatif dengan menggunakan teknik tringulasi, menurut Moleong (2017:330) yaitu:

“Teknik tringulasi adalah teknik pemeriksaan keabsahan data yang memanfaatkan sesuatu yang lain di luar dari data itu untuk keperluan pengecekan atau sebagai pembanding terhadap data itu. Melalui teknik pengujian keabsahan data penulis menggunakan teknik tringulasi dengan membandingkan berbagai data yang diperoleh dengan *check*, *recheck*, dan *cross check* terhadap data itu”.

Tringulasi dapat dilakukan dengan berbagai cara:

1. Membandingkan data hasil pengamatan dengan data hasil wawancara.
2. Membandingkan apa yang dilakukan orang didepan umum dengan apa yang dikatakan secara pribadi.
3. Membandingkan apa yang dikatakan orang-orang tentang situasi penelitian dengan apa yang dikatakan sepanjang waktu.
4. Membandingkan keadaan dan perspektif seseorang dengan berbagai pendapat dan pandangan orang seperti rakyat biasa, orang yang berpendidikan menengah atau tinggi, orang berbeda, orang pemerintahan.
5. Membandingkan hasil wawancara dengan isi suatu dokumentasi yang berkaitan.

Dalam penelitian kualitatif, suatu data dikatakan absah akurat jika memenuhi kriteria sebagai berikut:

- a. Ada kesamaan data dari hasil wawancara dengan para informan. Data dinyatakan akurat jika untuk pertanyaan yang sama diperoleh data atas jawaban yang sama dari informan. Jika jawaban informan berbeda-beda, maka data itu belum akurat/absah. Peneliti harus melakukan *tringulasi check, recheck, cross check* sampai diperoleh data atau informasi yang sama.
- b. Ada kesamaan data hasil wawancara dengan hasil pengamatan. Jika data dari hasil wawancara dengan hasil pengamatan itu tidak sama, maka data itu absah atau akurat. Peneliti harus melakukan *tringulasi* lagi *check, recheck* dan *cross check* sampai diperoleh data atau informasi yang sama.

1.8.5 Teknik Analisis Data

Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah teknik deskriptif, yaitu suatu penulisan yang menggambarkan keadaan yang sebenarnya pada saat penelitian berlangsung. Kemudian data tersebut dianalisis dan diinterpretasikan serta dibantu dengan keterangan tambahan yang dapat mendukung sebuah penelitian. Jadi penelitian ini menggunakan bagaimana Implementasi Kebijakan Penanganan Kemacetan di Kota Cirebon terutama di Jalan Pekiringan.

Miles and Huberman (dalam Sugiyono, 2017:246-252) mengemukakan bahwa aktivitas dalam analisis data kualitatif dilakukan secara interaktif dan berlangsung secara terus menerus sampai tuntas, sehingga datanya sudah jenuh.

Aktivitas dalam analisis data yaitu:

1. *Date Reduction* (Reduksi Data)
2. *Date Display* (Penyajian Data)
3. *Verivication* (Verivikasi Data)

Penjelasannya sebagai berikut:

1. *Date Reduction* (Reduksi Data)
Data yang diperoleh dari lapangan jumlahnya cukup banyak, untuk itu maka perlu dicatat secara teliti dan rinci. Seperti yang telah dikemukakan, semakin lama peneliti kelapangan, maka jumlah data akan semakin banyak, kompleks dan rumit. Untuk itu perlu segera dilakukan analisis data melalui reduksi data. Mereduksi data berarti merangkum, memilih hal-hal pokok, memfokuskan pada hal-hal yang penting dicari tema dan polanya.
2. *Data Display* (Penyajian Data)
Setelah data direduksi, maka langkah selanjutnya adalah mendisplaykan data. Dalam penelitian kualitatif, penyajian data bisa dilakukan dalam bentuk uraian singkat, bagan, hubungan antara kategori, flowchart dan sejenisnya. Dengan mendisplay data maka akan memudahkan untuk memahami apa yang terjadi, merencanakan kerja selanjutnya berdasarkan apa yang telah dipahami tersebut. Selanjutnya, disarankan, dalam melakukan display data, selain dengan teks yang naratif dapat juga berupa grafik, matrik, *network* (jejaring kerja) dan chart.
3. *Verivication* (Verivikasi Data)
Langkah ketiga dalam analisis data kualitatif menurut Miles and Huberman adalah penarikan kesimpulan atau verivikasi. Kesimpulan awal yang dikemukakan masih bersifat sementara, dan akan berubah bila tidak ditemukan bukti-bukti yang kuat mendukung pada tahap pengumpulan data berikutnya. Akan tetapi apabila kesimpulan yang dikemukakan pada tahap awal, di dukung oleh bukti-bukti yang valid dan konsisten saat peneliti kembali ke lapangan mengumpulkan data, maka kesimpulannya yang dikemukakan merupakan kesimpulan yang credible.

1.9 Lokasi dan Jadwal Penelitian

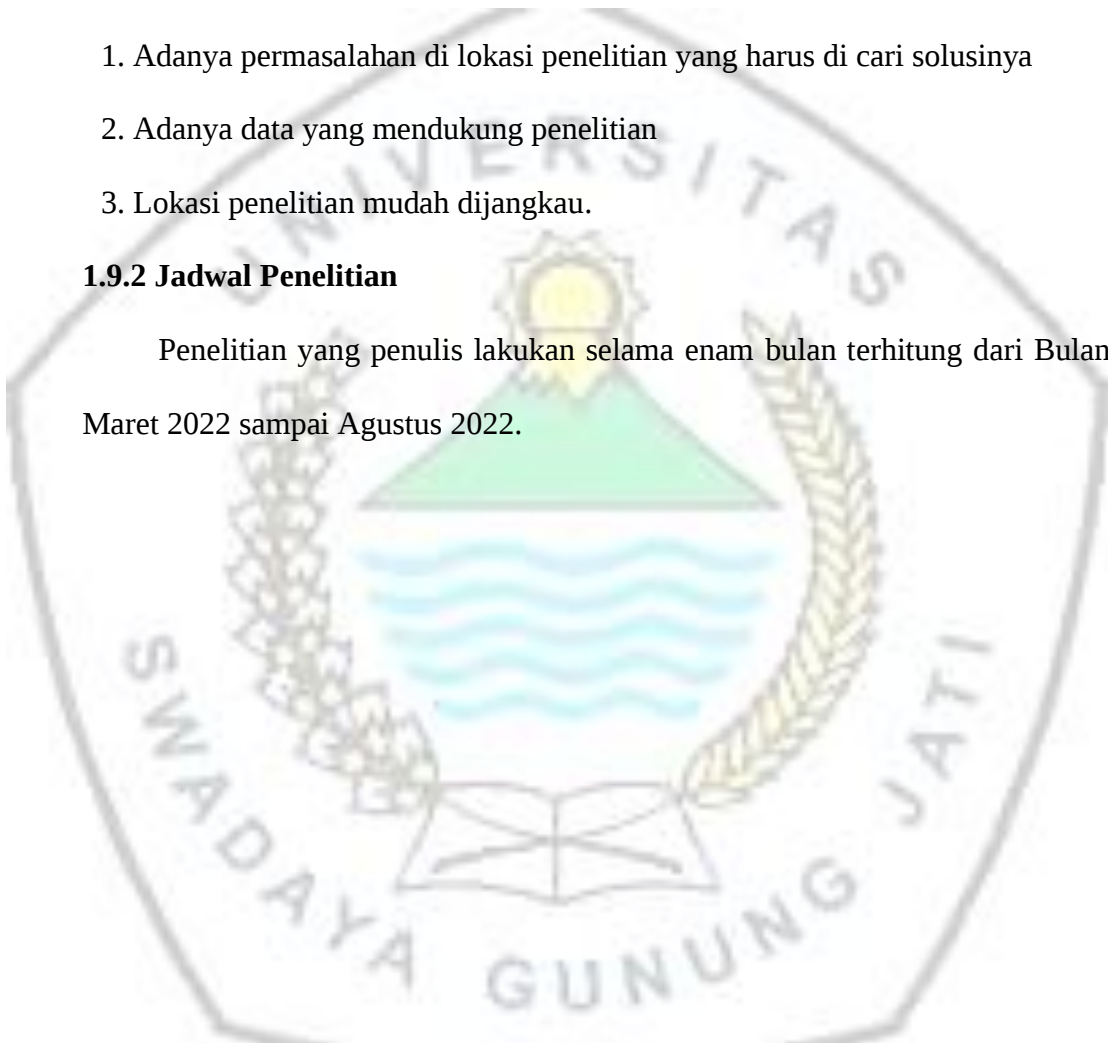
1.9.1 Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilaksanakan di Kantor Dinas Perhubungan Kota Cirebon Jalan Rara Santang Nomor 1 Kompleks Perkantoran Bima, Kesambi Kota Cirebon. Dengan mempertimbangkan alasan-alasan sebagai berikut:

1. Adanya permasalahan di lokasi penelitian yang harus di cari solusinya
2. Adanya data yang mendukung penelitian
3. Lokasi penelitian mudah dijangkau.

1.9.2 Jadwal Penelitian

Penelitian yang penulis lakukan selama enam bulan terhitung dari Bulan Maret 2022 sampai Agustus 2022.



Tabel 1.2
Jadwal Penelitian

Kegiatan	Tahun	Tahun 2022																							
	Bulan	Maret				April				Mei				Juni				Juli				Agustus			
	Minggu	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	
I.	TAHAP PERSIAPAN																								
1. Studi Literatur																									
2. Pengamatan																									
3. Penyusunan dan Bimbingan Proposal																									
4. Seminar Proposal																									
II.	TAHAP PELAKSANAAN																								
1. Penelitian																									
2. Wawancara																									
3. Pengolaan Data																									
4. Penyusunan dan Bimbingan Draft Skripsi																									
III.	TAHAP AKHIR																								
1. Seminar Draft Skripsi																									
2. Revisi Draft Skripsi																									
3. Sidang Skripsi																									